

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat. Sebagai implikasi dari perkembangan ini diharapkan kesempatan kerja akan bertambah, tingkat pendapatan meningkat, dan kemakmuran menjadi semakin lebih tinggi. (Sadono Sukirno, 2010:3)

M. P Todaro dan S. C Smith (2006, 28-29) memaparkan bahwa proses pembangunan di semua masyarakat paling tidak harus memiliki tiga tujuan inti sebagai berikut:

1. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup yang pokok; seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan perlindungan keamanan.
2. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan.

3. Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial sehingga memperkecil ketergantungan terhadap pihak lain.

Dengan demikian secara kasar dapat disimpulkan bahwa tujuan akhir dari setiap pembangunan adalah peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan penduduk, tidak akan ada manfaat yang lebih berarti dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi bila hal tersebut tidak dirasakan oleh masyarakat.

Ketimpangan besar dalam distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan merupakan dua masalah besar dalam pembangunan di banyak negara sedang berkembang, tidak terkecuali Indonesia. Dikatakan besar jika dua masalah ini berlarut-larut atau dibiarkan semakin parah, pada akhirnya akan menimbulkan konsekuensi politik dan sosial yang sangat serius.

Di Indonesia, pada awal pemerintahan orde baru para pembuat kebijakan dan perencana pembangunan ekonomi di Jakarta masih sangat percaya bahwa proses pembangunan ekonomi yang pada awalnya terpusatkan hanya di Jawa, khususnya Jakarta dan sekitarnya, dan hanya di sektor-sektor tertentu saja, pada akhirnya akan menghasilkan apa yang dimaksud *trickle down effect*. Oleh karena itu, pada awal periode orde baru hingga akhir 1970-an strategi pembangunan ekonomi yang dianut oleh pemerintahan Soeharto lebih berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pusat pembangunan ekonomi nasional dimulai di Pulau Jawa dengan alasan bahwa semua fasilitas yang dibutuhkan, seperti pelabuhan, jalan raya dan kereta api, telekomunikasi, kompleks industri, gedung-gedung

pemerintahan/administrasi negara, kantor-kantor perbankan, dan infrastruktur pendukung lainnya, lebih tersedia di Jawa dibandingkan di provinsi-provinsi lain di Indonesia. Pembangunan saat itu juga hanya terpusatkan hanya di sektor-sektor tertentu saja yang secara potensial memiliki kemampuan besar untuk menghasilkan nilai tambah barang yang tinggi, mereka percaya bahwa nantinya hasil daripada pembangunan itu akan “menetes” ke sektor-sektor dan wilayah Indonesia lainnya.

Menjelang akhir dekade 1970-an, pemerintah sudah mulai menyadari buruknya kualitas pembangunan yang dihasilkan dengan strategi tersebut. Indonesia memang menikmati laju pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun yang tinggi, tetapi tingkat kesenjangan dalam pembagian pendapatan nasional juga semakin besar dan jumlah orang miskin tetap banyak, bahkan meningkat tajam sejak krisis ekonomi. Oleh karena itu, sejak pelita III strategi pembangunan mulai diubah: tidak lagi hanya terfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama daripada pembangunan. Sejak itu perhatian mulai diberikan pada usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya melalui pengembangan industri-industri padat karya, pembangunan pedesaan, dan modernisasi pertanian. Hingga menjelang terjadinya krisis ekonomi, sudah banyak dilaksanakan program-program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi jumlah orang miskin dan ketimpangan pendapatan antara kelompok miskin dan kelompok kaya di tanah air. Sayangnya, krisis ekonomi tiba-tiba muncul yang diawali oleh krisis nilai tukar rupiah pada

pertengahan kedua tahun 1997 dan sebagai salah satu akibat langsungnya, jumlah orang miskin dan *gap* dalam distribusi pendapatan di tanah air membesar, bahkan menjadi jauh lebih buruk dibandingkan dengan kondisinya sebelum krisis. (Tulus Tambunan, 2009: 81- 82).

Pada puncak krisis ekonomi tahun 1998-1999 penduduk miskin Indonesia mencapai sekitar 24% dari jumlah penduduk atau hampir 40 juta orang. Tahun 2002 angka tersebut sudah turun menjadi 18%, dan menjadi 14% pada tahun 2004. Situasi terbaik terjadi antara tahun 1987-1996 ketika angka rata-rata kemiskinan berada di bawah 20%, dan yang paling baik adalah pada tahun 1996 ketika angka kemiskinan hanya mencapai 11,3%. Krisis yang terjadi secara mendadak dan diluar perkiraan ini merupakan pukulan yang sangat berat bagi pembangunan Indonesia. Bagi kebanyakan orang, dampak dari krisis yang terparah dan langsung dirasakan, diakibatkan oleh inflasi. Antara tahun 1997 dan 1998 inflasi meningkat dari 6% menjadi 78%, sementara upah riil turun menjadi hanya sekitar sepertiga dari nilai sebelumnya. Akibatnya, kemiskinan meningkat tajam. Antara tahun 1996 dan 1999 proporsi orang yang hidup di bawah garis kemiskinan bertambah dari 18% menjadi 24% dari jumlah penduduk. Pada saat yang sama, kondisi kemiskinan menjadi semakin parah, karena pendapatan kaum miskin secara keseluruhan menurun jauh di bawah garis kemiskinan. (www.contohskripsitesis.com/distribusipendapatan.doc)

Tabel 1.1
Kemiskinan di Indonesia 1990-2008

Tahun	Tingkat Kemiskinan (%)			Jumlah Orang Miskin (juta orang)		
	Kota	Desa	Nasional	Kota	Desa	Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1990	16,8	14,3	15,1	9,4	17,8	27,2
1993	13,4	13,8	13,7	8,7	17,2	25,9
1996	13,4	19,8	17,5	9,4	24,6	34,0
1998	21,9	25,7	24,2	17,6	31,9	49,5
1999	19,4	26,0	23,4	15,6	32,3	48,0
2000	14,6	22,4	19,1	12,3	26,4	38,7
2001	9,8	24,8	18,4	8,6	29,3	37,9
2002	14,5	21,1	18,2	13,3	25,1	38,4
2003	13,6	20,2	17,4	12,2	25,1	37,3
2004	12,1	20,1	16,7	11,4	24,8	36,1
2005	11,7	19,98	15,97	12,4	22,7	35,1
2006	13,5	21,8	17,8	14,5	24,8	39,3
2007	12,5	20,4	16,6	13,6	23,6	37,2
2008	11,65*	18,93*	15,4	12,76*	22,19*	34,96

Sumber: BPS (Tulus Tambunan, 2009:104)

*BPS, Statistik Indonesia, 2008

Setelah sempat naik mencapai 23,5% tahun 1999 akibat krisis ekonomi 1997/1998, tingkat kemiskinan cenderung menurun terus, terkecuali tahun 2006 meningkat kembali ke 17,75% atau sekitar 39,05 juta orang. Jumlah rumah tangga miskin diperkirakan sebanyak 19,1 juta, terdiri atas 2,8 juta sangat miskin, 8,2 juta miskin dan 6,9 juta dekat miskin. Kenaikan jumlah orang miskin tahun 2006 diduga kuat akibat dampak dari pemotongan subsidi BBM menjelang akhir 2005.

Pemerintah sendiri selalu mencanangkan upaya penanggulangan kemiskinan dari tahun ketahun, namun jumlah penduduk miskin Indonesia tidak juga mengalami penurunan yang signifikan, walaupun data di BPS menunjukkan

kecenderungan penurunan jumlah penduduk miskin, namun secara kualitatif belum menampakkan dampak perubahan yang nyata malahan kondisinya semakin memprihatinkan tiap tahunnya.

Distribusi pendapatan antarlapisan pendapatan masyarakat sendiri dapat ditelaah dengan mengamati perkembangan angka-angka Rasio Gini. Koefisien Gini itu sendiri, bukanlah merupakan indikator paling ideal tentang ketidakmerataan distribusi pendapatan antarlapisan. Namun setidaknya Koefisien Gini cukup memberikan gambaran mengenai kecenderungan umum dalam pola pembagian pendapatan. Berikut adalah angka-angka koefisien Gini yang dihitung berdasarkan pendekatan pengeluaran.

Tabel 1.2

Perkembangan Rasio Gini di Indonesia, 1990 – 2008

Tahun	Koefisien Gini	Tahun	Koefisien Gini
(1)	(2)	(3)	(4)
1990	0,330 ¹	1999	0,308 ¹
1991	0,33 ²	2000	0,295 ¹
1992	0,33 ³	2001	0,299 ¹
1993	0,34 ¹	2002	0,329 ¹
1994	0,34 ²	2004	0,32 ¹
1995	0,34 ²	2005	0,33 ¹
1996	0,35 ¹	2006	0,357 ¹
1997	0,35 ³	2007	0,376 ¹
1998	0,32 ¹	2008	0,368 ¹

Sumber: 1. Biro Pusat Statistik, berbagai edisi.

2. *Asian Development Report*, ADB

3. *Wider Data*, UN University 2000

Angka koefisien Gini Indonesia selalu berada di kisaran 0.3, bahkan pada masa pra krisis tepatnya antara tahun 1990 sampai dengan 1996 ketimpangan di Indonesia cenderung memburuk. Hanya saja pada saat krisis ekonomi terjadi suatu fenomena yang menarik dimana ketimpangan distribusi pendapatan mengalami penurunan.

Penurunan Rasio Gini pada tahun setelah krisis dapat dijelaskan oleh pendapat Caille, et.al (1999) dalam S. S Remi dan P. Tjiptoherijanto (2002:10-11) yang memaparkan bahwa krisis dapat mempengaruhi lebih dahsyat terhadap pengeluaran dari mereka yang terlibat pada sektor modern informal (mewakili kelas pendapatan menengah dan tinggi) ketimbang mereka yang berada di sektor tradisional informal (mewakili kelas pendapatan rendah). Dampak ini diyakini dapat menembus pergeseran besar dalam harga-harga relatif yang telah dapat memberi keuntungan kepada mereka yang terlibat dalam ekonomi pedesaan ketimbang mereka dalam ekonomi formal modern. Sebagai akibatnya, krisis telah menyebabkan penurunan yang lebih drastis pada pengeluaran rata-rata dari golongan menengah dan golongan tinggi dibandingkan pengeluaran golongan rendah yang telah berada pada tingkat rendah. Pola penurunan seperti itu dalam pengeluaran dapat merefleksikan penurunan dalam pendapatan total. Sementara itu, tingkat pengeluaran kelas rendah hampir tidak memungkinkan untuk turun lebih rendah lagi guna memenuhi konsumsi dasar mereka pada tingkat subsisten. Hal ini dapat menjelaskan dengan baik “perbaikan” pada rasio Gini dan indikator ketidakmerataan lainnya selama krisis.

Rasio Gini terus saja meningkat di tujuh tahun terakhir ini. Kesenjangan antar masyarakat yang menjadi lebih besar dan melebar ini diduga karena terjadinya akumulasi kekayaan pada suatu golongan masyarakat. Kesenjangan yang terjadi ini lambat laun berubah dari hanya kesenjangan ekonomi menjadi suatu kesenjangan sosial. Untuk kondisi di Indonesia, semua golongan pendapatan di masyarakat ekonomi menengah ke atas mengalami pertumbuhan tingkat pendapatan yang lebih cepat dan besar dibandingkan dengan pendapatan golongan miskin. Sehingga secara akumulasi perbedaan pendapatan tersebut lambat laun menjadi semakin melebar seiring dengan berjalannya waktu, akibatnya distribusi pendapatan menjadi semakin tidak merata.

Secara lebih spesifik, di bawah ini disajikan tabel 1.3 angka rasio Gini beberapa provinsi sebagai perwakilan dari beberapa pulau besar di Indonesia tiga tahun terakhir.

Tabel 1.3
Rasio Gini Beberapa Provinsi di Indonesia, 2007-2009

Provinsi	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	0,27	0,27	0,29
Lampung	0,39	0,35	0,35
DKI Jakarta	0,34	0,33	0,36
Jawa Barat	0,34	0,35	0,36
DI Yogyakarta	0,37	0,36	0,38
Bali	0,33	0,30	0,31
Kalimantan Timur	0,33	0,34	0,38
Sulawesi Selatan	0,37	0,36	0,39
Sulawesi Tengah	0,18	0,33	0,34
Papua	0,41	0,40	0,38

Sumber: Statistik Indonesia, BPS

Dapat dilihat dari tabel 1.3, ketimpangan di beberapa propinsi di Indonesia tiga tahun terakhir ini cenderung meningkat. Provinsi yang patut menjadi sorotan adalah provinsi Lampung, DI Yogyakarta, Sulawesi Selatan dan Papua yang memiliki angka rasio Gini yang bisa dikatakan cukup tinggi yaitu di atas 0,35. Namun, peningkatan rasio Gini yang cukup signifikan dapat dilihat di provinsi Kalimantan Timur dua tahun terakhir ini. Sebagai mana kita ketahui, provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi penyumbang PDB terbesar di Indonesia dengan PDRB tahun 2009 mencapai 105,5 triliun rupiah. Namun pencapaian tersebut tidak diiringi dengan pemerataan pendapatan terbukti dengan meningkatnya angka rasio Gini dari 0,34 menjadi 0,38.

Banyak faktor yang disinyalir dapat mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan. Simon Kuznet dalam hipotesanya menyatakan bahwa terdapat suatu hubungan (*trade off*) antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan distribusi pendapatan. Dalam hipotesanya, Kuznet memaparkan bahwa pada tahap awal pembangunan, distribusi pendapatan akan cenderung semakin tidak merata, tapi kemudian akan membaik pada tahap-tahap pembangunan selanjutnya. Hipotesa Kuznet juga telah dikonfirmasi oleh Paukert (1973) dan Ahluwalia (1976).

B. Gustafsson dan M. Johansson (1997) dalam penelitiannya di 16 negara OECD mendiagnosa faktor-faktor yang menyebabkan semakin melebarnya ketimpangan pendapatan di negara-negara tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah tingkat pengangguran, inflasi, struktur populasi, PDB per kapita, impor dari

negara-negara berkembang, dan sektor publik. Sejalan dengan penelitian B. Gustafsson dan M. Johansson, Oleksiy Ivaschenko (2001) mendiagnosa faktor-faktor penyebab terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan di negara-negara transisi di Eropa Timur dan perpecahan Uni Soviet. Ivaschenko memaparkan bahwa penyebab timbulnya ketimpangan pembagian pendapatan di negara-negara transisi tersebut yaitu: tingkat pertumbuhan ekonomi (yang diukur dengan Produk Domestik Bruto per kapita), kondisi makroekonomi (tingkat inflasi, pengangguran), keterlibatan pemerintah dalam perekonomian (konsumsi pemerintah, sosial transfer), dan perubahan struktural (liberalisasi ekonomi, privatisasi, deindustrialisasi). Peran pemerintah dalam perekonomian yang disinyalir dapat mempengaruhi distribusi pendapatan ini juga telah dikonfirmasi dalam penelitian Steven Stack pada tahun 1978.

Dari latar belakang diatas, dengan permasalahan, mengapa tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia mengalami fluktuasi yang cenderung meningkat sehingga semakin melebarkan pendapatan diantara golongan masyarakat, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia Periode Tahun 1996-2008.**

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan permasalahan yang hendak dijawab yaitu sebagai berikut:

1. Apakah PDRB Riil per Kapita (sebagai perwakilan pertumbuhan ekonomi jangka pendek), Nilai Kuadrat LnPDRB Riil per Kapita (sebagai perwakilan pertumbuhan ekonomi jangka panjang), Inflasi, Tingkat Pengangguran, Persentase Bagian Konsumsi Pemerintah dari PDRB riil, Persentase Sumbangan Sektor Industri pada PDRB riil, dan Investasi Swasta secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia periode tahun 1996-2008?
2. Seberapa besar pengaruh PDRB Riil per Kapita (sebagai perwakilan pertumbuhan ekonomi jangka pendek), Nilai Kuadrat LnPDRB Riil per Kapita (sebagai perwakilan pertumbuhan ekonomi jangka panjang), Inflasi, Tingkat Pengangguran, Persentase Bagian Konsumsi Pemerintah dari PDRB riil, Persentase Sumbangan Sektor Industri pada PDRB riil, dan Investasi Swasta secara parsial maupun simultan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia periode tahun 1996-2008?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh PDRB Riil per Kapita (sebagai perwakilan pertumbuhan ekonomi jangka pendek), Nilai Kuadrat LnPDRB Riil per Kapita (sebagai perwakilan pertumbuhan ekonomi jangka panjang), Inflasi, Tingkat Pengangguran, Persentase Bagian Konsumsi Pemerintah

dari PDRB riil, Persentase Sumbangan Sektor Industri pada PDRB riil, dan Investasi Swasta secara parsial maupun simultan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia periode tahun 1996-2008.

2. Untuk mengetahui besar pengaruh PDRB Riil per Kapita (sebagai perwakilan pertumbuhan ekonomi jangka pendek), Nilai Kuadrat \ln PDRB Riil per Kapita (sebagai perwakilan pertumbuhan ekonomi jangka panjang), Inflasi, Tingkat Pengangguran, Persentase Bagian Konsumsi Pemerintah dari PDRB riil, Persentase Sumbangan Sektor Industri pada PDRB riil, dan Investasi Swasta secara parsial maupun simultan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia periode tahun 1996-2008.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan kajian dalam mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan bidang Ekonomi Publik dan Ekonomi Pembangunan khususnya tentang distribusi pendapatan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi informasi dan bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, para investor, departemen ketenagakerjaan dan instansi yang bersangkutan untuk memutuskan

kebijakan-kebijakan yang tepat dalam menghadapi ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia.

